



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 417 - KUM/2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat kerja;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 / MENKES / PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. penyusunan produk hukum daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelaksanaan deteksi dini;
 - d. pemberdayaan Masyarakat;
 - e. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi;
 - g. penyediaan data dan informasi Pencegahan

Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika (P4GN);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Nomor DPA A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

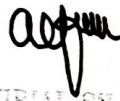
Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFRIAL S.H. MN
NIP.19750203 199403 2 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ 417-KUM/2021
TANGGAL : 23 Februari 2021

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
A. PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG P4GN					
1	Pembentukan produk Hukum Daerah tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	1 BNNK Kab. Tanah Laut 2 Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut 3 Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	Terbentuknya regulasi (PERDA) tentang P4GN di Kabupaten Tanah Laut	
2	Pembentukan dan penyusunan Tim terpadu tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Kabag. Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut	Optimalisasi Pelaksanaan dengan pembentukan dan penyusunan SK Bupati tentang Tim Terpadu P4GN, SK Bupati tentang RAD P4GN	
3	Pembentukan Satgas/Relawan Anti Narkoba di lingkup SKPD Kabupaten Tanah Laut	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Terbentuknya Satgas /Relawan Anti Narkoba internal dengan Surat Keputusan Kepala SKPD masing-masing	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
4	Pembuatan Regulasi Internal SKPD tentang P4GN Kabupaten Tanah Laut	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Terbentuknya regulasi internal yang ditanda tangani Kepala SKPD masing-masing	
5	Penunjukan Staf masing-masing SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai Admin/Operator Pelaporan P4GN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	BNNK dan Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Tersedianya Staf Admin / Operator Pelaporan P4GN	
B. SOSIALISASI					
6	Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya kepada ASN,TNI,POLRI Pelajar,Mahasiswa dan Masyarakat Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	BNNK dan Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Tersosialisasinya informasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya melalui berbagai saluran Komunikasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Vertikal	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
7	Rapat Koordinasi dan Evaluasi dalam rangka Pencegahan Penanggulangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	BNNK dan Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Tanah Laut	
8	Penyampaian informasi bahaya hukum tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut	1 BNNK Kab. Tanah Laut 2 Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut 3 Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	Penyampaian informasi tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dalam pandangan Agama melalui kegiatan Keagamaan (Khotbah, Ceramah, Kajian Agama) oleh Tokoh Agama, Penyuluh Agama dan Tokoh Masyarakat	
9	Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada sarana Transportasi serta moda Transportasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut	1 Polres Tanah Laut 2 BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut 3 BPKAD Kabupaten Tanah Laut 4 Satpol dan Damkar Kab. Tanah Laut	Tersampainya Informasi tentang Bahaya Penyalahgunaan dan konsekuensi hukum pada peredaran gelap Narkotika dengan terpasangnya Slogan Anti Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dengan penempatan yang strategis pada sarana dan prasarana moda transportasi umum	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
10	Workshop optimalisasi pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tanah Laut	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	1 BNN Kabupaten Tanah Laut 2 BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut 3 BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Terselenggaranya Workshop dan supervisi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Tanah Laut	
11	Penyediaan dan Penyebaran Informasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kepada Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Vertikal terkait	Penyampaian Informasi kepada Masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan konsekuensi Hukum peredaran gelap Narkotika melalui iklan layanan masyarakat	
12	Diseminasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya pada Lembaga Pendidik dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut	BNN Kabupaten Tanah Laut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Terlaksanannya diseminasi dengan Pengembangan Topik Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya kedalam salah satu Materi Diklat Aparatur Sipil Negara	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
13	Pembinaan dan penyeberluasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya kepada Perusahaan Swasta dan Masyarakat yang menggunakan atau menjual bahan-bahan zat adiktif lainnya	Dinas Koperasi, Uasa Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut	1 Polres Tanah Laut 2 BNN Kabupaten Tanah Laut 3 Dinas Kesehatan Kab.Tanah Laut 4 Dinas PM&PTSP Kab. Tanah Laut	Terseberluasnya Informasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya kepada Perusahaan Swasta dan Masyarakat yang menggunakan atau menjual bahan-bahan zat adiktif lainnya	
14	Deklarasi Kabupaten Tanah laut Perangi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Vertikal terkait	Terlaksananya kegiatan deklarasi Kabupaten Tanah Laut Anti Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya dalam rangka Hari Anti Narkoba Nasional	
15	Penguatan Pendidikan Karakter Pemuda Anti Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Tanah Laut	1 BNNK Kab.Tanah Laut 2 Kesbangpol Kab.Tanah Laut	Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Pemuda dengan mentransformasikan semangat juang pahlawan dalam rangka Napak Tilas Perjuangan dan Mengkampanyekan Gerakan Pemuda Anti Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
16	Bimbingan Teknis tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya kepada Paramedis	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	BNNK Kabupaten Tanah Laut	Tersampaikannya Informasi tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya kepada Pasien, Masyarakat oleh Paramedis	
C. PELAKSANAAN DETEKSI DINI					
17	Pelaksanaan Test Urine kepada seluruh ASN dan Non ASN termasuk Calon Aparatur Sipil Negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	1 BNNK Kabupaten Tanah Laut 2 BKPSDM Kabupaten Tanah Laut 3 Dinas Kesehatan Kab. Tala 4 Inspektorat Kab. Tanah Laut Kab. Organisasi Setda Kab. Tala	Terlaksananya Test Urine kepada seluruh ASN, Non ASN dimasing-masing SKPD Kabupaten Tanah Laut	
18	Pelaksanaan Sidak ditempat Hiburan Malam (THM) pemeriksaan/razia peredaran gelap Narkotika dan zat adiktif lainnya serta test urine kepada pegunjung tempat hiburan malam	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	1 Polres Tanah Laut 2 Kodim 1009 Pelaihari 3 BNNK Kab. Tanah Laut 4 Satpol PP & PMK Kab. Tanah Laut	Terlaksananya Sidak Tempat Hiburan Malam dengan melakukan pemeriksaan/razia peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya serta test urine kepada pengunjung THM dengan sasaran penjarangan ASN, Anggota TNI Polri dan Masyarakat umum yang terindikasi pengguna narkotika	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
19	Penguatan Pengawasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui pintu masuk perbatasan Kabupaten Tanah Laut	Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut	Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Vertikal terkait	Optimalnya Pengetatan dan Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya melalui pintu masuk perbatasan kabupaten Tanah laut	
20	Perencanaan, penyediaan dan optimalisasi Anggaran Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Tanah Laut	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut	Penyediaan dan optimalisasi Anggaran Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif lainnya Kabupaten Tanah Laut	
D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
21	Membentuk Satgas/Relawan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya di ruang lingkup satuan Pendidikan (Perguruan Tinggi, Sekolah dan Madrasah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut	Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Terbentuknya Satgas/Relawan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya di ruang lingkup Satuan Pendidikan (Perguruan Tinggi, Sekolah dan Madrasah)	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
22	Penyuluhan Bahaya Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya kepada wisatawan dan masyarakat disekitar Obyek Wisata Kabupaten Tanah Laut	Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	BNNK Kabupaten Tanah Laut, BAPPEDA, Dinas Sosial, Camat dan Kepala Desa Setempat Kabupaten Tanah Laut	Tersampaikannya Informasi dan Edukasi tentang Bahaya Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya kepada wisatawan dan masyarakat disekitar Obyek Wisata dengan membuat peraturan atau himbauan larangan oleh pengelola Kabupaten Tanah Laut	
23	Pelatihan Kader Pemuda Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	Dinas Pemuda dan Olan Raga Kabupaten Tanah Laut	BNNK Kabupaten Tanah Laut, BAPPEDA, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pemuda tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	
24	Pengembangan Potensi Masyarakat pada kawasan dan rentan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut	BNNK Kabupaten tanah Laut, BAPPEDA, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut	Terselenggaranya Pemberdayaan Potensi Masyarakat pada Kawasan Rawan dan Rentan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
25	Optimalisasi Pelaksanaan Program Desa Bersih dari Narkoba (DESA BERSINAR) melalui Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut	1 BNNK Kab. Tanah Laut 2 BAPPEDA Kab. Tanah Laut 3 BPKAD Kab. Tanah Laut 4 Desa Setempat 5 Disnaker&perin Kab. Tanah Laut	Terlaksanannya Program Desa BERSINAR melalui kegiatan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya dan Penggunaan Dana Desa	
26	Mengintegrasikan Pengenalan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya dalam bentuk KURIKULUM kedalam Mata Pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan Formal dan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut	1 Kementerian Agama Kab. Tanah Laut 2 BNNK Kab. Tanah Laut	Tersampaikannya Pengenalan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya dalam mata pelajaran yang relevan sesuai Jenjang Pendidikan oleh Tenaga Pengajar	
27	Perananan Ormas dan LSM terhadap Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	Bandan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	1 Kementerian Agama Kab. Tala 2 BNNK Kab. Tanah Laut 3 Dinas Sosial Kab Tanah Laut	Terlaksanannya peran Ormas dan LSM dalam Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
28	Melaksanakan patroli terpadu pada daerah rawan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut	1 Polres Tanah Laut 2 KODIM 1009 Pelaihari 3 BNNK Kab. Tanah Laut 4 Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut 5 Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat sehingga terhindar dari bahaya Narkoba	
E. PEMETAAN WILAYAH RAWAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN PEREDARAN GELAP DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA					
29	Pengumpulan dan Validasi Informasi tentang sebaran wilayah Rawan dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	BNNK Kabupaten Tanah Laut	1 Polres Tanah Laut 2 Kejaksaan Negeri Pelaihari 3 KODIM 1009 Pelaihari 4 Pengadilan Negeri Tanah Laut 5 Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut	Diperolehnya Data Dukung dan hasil Informasi tentang Pemetaan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	
30	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemetaan Permasalahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut	1 Polres Tanah Laut 2 Kejaksaan Negeri Pelaihari 3 Pengadilan Negeri Tanah Laut 4 BNNK Kab. Tanah Laut 5 Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut	Tertentuknya jejaring masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pemetaan permasalahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
F. PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN REHABILITASI					
31	Penyediaan Layanan Rehabilitasi yang responsif dan usia serta berbagai latar belakang Pecandu, Pengguna dan Korban Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	RSUD.H.BOEJASIN PELAIHARI	1 Polres Tanah laut 2 Kejaksaan Negeri Pelaihari 3 Pengadilan Negeri Tanah Laut 4 BNNK Kabupaten Tanah Laut 5 Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	Tersedianya layanan rehabilitasi responsif dan usia bagi Pecandu, Pengguna dan Korban Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	
32	Penyediaan dan Peningkatan Pengembangan Kompetensi SDM Pelaksana Rehabilitasi (Tenaga Medis) yang sesuai standar	RSUD.H.BOEJASIN PELAIHARI	1 BNNK Kabupaten Tanah Laut 2 Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut 3 Jejaringnya Kabupaten Tanah Laut	Meningkatnya kapasitas kemampuan SDM Pelaksana (Tenaga Medis) dalam merehabilitasi Pecandu, Pengguna dan Korban Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	
33	Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rehabilitasi yang optimal sesuai standar Nasional	RSUD.H.BOEJASIN PELAIHARI	1 BAPPEDA Kab. Tanah Laut 2 BPKAD Kab. Tanah Laut 3 Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut	Tersedianya Sarana dan Pra Sarana Rehabilitasi melalui usulan Perencanaan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
34	Pembinaan dan pemantauan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	1 BNNK Kab. Tanah Laut 2 Dinas Sosial Kab. Tanah Laut 3 Badan Kesbangpol Kab. Tanah Laut	Optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)	
35	Pendampingan Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut	1 Polres Tanah Laut 2 Kejaksaan Negeri Pelaihari 3 Pengadilan Negeri Tanah Laut 4 BNNK Kab. Tanah Laut 5 Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut 6 Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	Fasilitasi dengan Pendampingan Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	
36	Melakukan Rehabilitasi Sosial bagi Mantan Narapidana, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut	1 BNNK Kab. Tanah Laut 2 Pengadilan Negeri Pelaihari 3 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut	Terlaksananya Bimbingan atau Penyuluhan bagi Mantan Narapidana, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya terhadap masyarakat secara terpadu	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
G. PENINGKATAN PERAN SERTA DINAS TERKAIT DAN PIHAK LAIN DALAM PENYELENGGARAN KEGIATAN VOKASIONAL					
37	Pemberdayaan Narapidana, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	1 Pengadilan Negeri Pelaihari 2 Dinas Kop UK & Dag Kab. Tanah Laut	Terlaksananya kegiatan pelatihan berbasis kompetensi bagi Narapidana, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	
38	Pembinaan dan Pelatihan Usaha Mikro Kecil Kecil menengah (UMKM) bagi Narapidana, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut	1 Pengadilan Negeri Pelaihari 2 Disnaker & Perin Kab. Tanah Laut	Facilitasi dukungan pengembangan UMKM bagi Narapidana, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya melalui permodalan, bantuan peralatan, manajemen usaha dan pemasaran	
G. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PAGN					
39	Penyusunan Sistem dan Penyediaan Data tentang Informasi Rehabilitasi secara terpadu di Kabupaten Tanah Laut	BNNK Kabupaten Tanah Laut	1 Pengadilan Negeri Pelaihari 2 Diskominfo Kab. Tanah Laut 3 Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut 4 Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	Tersedianya Sistem Informasi Rehabilitasi Terpadu Kabupaten Tanah Laut	
40	Pengumpulan dan Penyediaan Data terkait Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Vertikal terkait	Tersedianya Data Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	

41	Penyediaan Data Angka Prevelansi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya	BNNK Kabupaten Tanah Laut	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Tersedianya Data Angka Prevelansi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Peredaran Gelap dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Tanah Laut	
----	--	---------------------------	--	---	--

SALINAN SEPULUH DENGAN ASLINYA

KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN

Ttd

H. SUKAMTA

ALIRIYATI
NID.1972020119-01-001

BUPATI TANAH LAUT,